



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI X DPR RI
(PENDIDIKAN, PEMUDA, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN
PERPUSTAKAAN)**

=====

Tahun Sidang	:	2010 - 2011
Masa Persidangan	:	III (Ketiga)
Rapat Ke	:	3 (Tiga)
Sifat	:	Terbuka
Jenis Rapat	:	Rapat Kerja
Dengan	:	Menteri Pendidikan Nasional
Hari/Tanggal	:	Senin, 17 Januari 2011
Pukul	:	10.15 – 13.45 WIB.
Tempat	:	Ruang Rapat Komisi X DPR RI
Ketua Rapat	:	Prof. Dr. H. Mahyuddin NS, Sp.Og./Ketua Komisi X DPR RI
Sekretaris Rapat	:	Agus Salim, SH/Kabagset Komisi X DPR RI
Acara	:	1. Masalah Ujian Nasional! 2. Eksistensi program jardiknas 3. Evaluasi program TIK secara keseluruhan 4. Evaluasi program Dapodik 5. Pembahasan kedudukan Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) 6. Lain-lain
Hadir	:	48 orang dari 52 Anggota Komisi X DPR RI
Hadir Pemerintah	:	Menteri Pendidikan Nasional beserta jajarannya.

KESIMPULAN/KEPUTUSAN

- I. Rapat Kerja Komisi X DPR RI dibuka pukul 10.15 WIB oleh Ketua Komisi X DPR RI, Prof. Dr. H. Mahyuddin NS, Sp.Og., dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.
- II. Rapat diawali dengan penjelasan Ketua Rapat dan dilanjutkan dengan penjelasan Menteri Pendidikan Nasional dan tanggapan, saran, dan masukan dari anggota Komisi X DPR RI, maka rapat dapat mengambil beberapa kesimpulan/ keputusan sebagai berikut :
 - A. **Laporan Daya Serap APBN TA 2010**
Komisi X DPR RI menilai bahwa laporan daya serap APBN TA 2010 Kementerian Pendidikan Nasional sebesar 92,90% menempati nomor urut 4 (empat) dari 10 (sepuluh) Kementerian terbesar pengguna anggaran TA 2010

menunjukkan bahwa daya serap tersebut cukup baik. Selanjutnya Komisi X DPR RI mendesak Mendiknas untuk meningkatkan kinerjanya pada TA 2011 agar daya serap TA 2011 lebih meningkat dari TA 2010.

B. Reorganisasi Kemdiknas dan Realokasi Anggaran Kemdiknas TA 2011

1. Reorganisasi Kemdiknas harus memperhatikan dan menindaklanjuti PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan utamanya terhadap Badan Standar Nasional Pendidikan.
2. Reorganisasi Kemdiknas dan relokasi anggaran Kemdiknas TA 2011 harus diikuti dengan peningkatan layanan yang lebih baik dan penggunaan anggaran harus lebih efektif.

C. Postur Anggaran

Komisi X DPR RI dan Menteri Pendidikan Nasional RI sepakat membentuk Panja Postur Anggaran Pendidikan untuk menelaah lebih lanjut terhadap penyusunan dan penggunaan anggaran pendidikan yang lebih efektif berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

D. Persiapan UN TA 2011

Sosialisasi pelaksanaan UN TA 2011 harus lebih diintensifkan, pelaksanaan lebih adil dengan menjunjung tinggi kejujuran, pengawasan ditingkatkan, dan pemberian sanksi tegas kepada pihak yang tidak mematuhi norma yang sudah ditetapkan.

E. Bantuan Operasional Sekolah TA 2011


Petunjuk teknis Bantuan Operasional Sekolah harus mudah dimengerti oleh pemangku kepentingan agar dalam pelaksanaannya tepat waktu, tepat jumlah, tepat penggunaan dan lebih efektif, untuk itu Komisi X DPR RI mendesak Mendiknas untuk lebih meningkatkan sistem pengendalian dan pengawasan pelaksanaannya.

F. Lain-lain

Komisi X DPR RI dan Mendiknas sepakat akan mengadakan Raker lanjutan dengan agenda pendalaman persiapan pelaksanaan kerja dan APBN TA 2011 Kementerian Pendidikan Nasional (Struktur Organisasi 9 Unit Utama) dalam waktu dekat.

III. Rapat diakhiri pada pukul 13.45 WIB

Jakarta, 17 Januari 2010
PIMPINAN KOMISI X DPR RI
K E T U A,


PROF. DR. H. MAHYUDDIN NS, Sp.Og. (K)